

PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PILKADA SUMATERA UTARA 2013 DI KOTA MEDAN

Budi Chrismanto Sirait

Sirait_budi@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Abstract

Direct election born from the passion for the welfare of society and the acceleration of development in the area. Voters factors have an important role in the success of direct election. Smart voters are not like puppets which cannot be separated from the master's control. The voters who think rationally and logically will take the initiative not to use their right to vote. Conceptually, they have higher participation quality, but unfortunately, this higher quality is being discriminated by a concept where the quality of an election is showed by the quantity of people participating in it. Therefore, non voting behavior phenomenon in Medan should become learning for everyone taking a part in electoral democracy, generally in Indonesia and especially in Medan and North Sumatra.

Keyword: Non Voting Behavior, Election

Abstrak

Pilkada langsung lahir dari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah. Faktor pemilih memiliki peranan penting dalam menyukseskan Pilkada langsung. Pemilih yang cerdas bukan seperti wayang yang tidak bisa lepas dari kendali dalangnya. Pemilih yang menggunakan nalar dan rasionalitas yang baik dengan mengambil inisiatif untuk tidak menggunakan hak pilihnya, secara konseptual sebenarnya memiliki kualitas partisipasi yang lebih tinggi, namun sayangnya justru kualitas yang lebih tinggi ini sering terdiskriminasi oleh pemahaman bahwa kualitas pemilu harus ditunjukkan oleh kuantitas orang yang menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, Dengan besarnya perolehan fenomena perilaku tidak memilih atau golput yang terjadi di Kota Medan ini, dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia secara umum dan Kota Medan, Sumatera Utara secara khusus.

Kata Kunci: Perilaku Tidak Memilih, Pilkada

Pendahuluan

Strategi dan kontestasi politik di Sumatera Utara dapat menggambarkan miniatur Indonesia. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk sekitar 13,9 juta jiwa ini bagaikan wadah pertemuan beragam etnis maupun agama. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan penduduk yang plural dan tersebar di wilayah pegunungan, dataran rendah hingga pesisir. Berbagai macam etnis yang ada di Sumatera Utara diantaranya adalah etnis Jawa 16,5%,

Melayu 42%, Batak 35%, dan etnis lainnya sekitar 6%. Dalam hal kepercayaan atau agama, terdapat pula agama islam 66,09%, Kristen 31%, Buddha 2,34% serta Hindu atau Konghucu 0,11%. (BPS Provinsi Sumatera Utara). Gambaran keanekaragaman kultur dan budaya yang dinamis juga tentunya mewarnai ekspresi politik di wilayah ini. Dinamika politik yang terjadi juga menjadi sebuah keniscayaan dari beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam kontestasi

politik masih sangat dominan seperti faktor politik dengan dimensi sosial kultural masyarakat. Faktor politik yang dimaksud berupa akuntabilitas elite politik pada pandangan publik dan strategi partai politik menarik simpati publik seperti praktik transaksi politik. Faktor sosial kultural diantaranya adalah etnisitas, agama dan adat istiadat. Hal ini yang menjelaskan realita jika warna politik Sumatera Utara dari pemilu ke pemilu cenderung dinamis.

Melihat dari konteks Pilkada langsung yang lahir dari semangat instrumen kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses perwujudan aspirasi masyarakat daerah, maka pilkada diharapkan dapat mereduksi secara masif adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada langsung juga diharapkan mampu menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat (Marijan, Kacung, 2010). Pilkada lahir dari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah. Asumsi ini jelas dapat diterima akal sehat dikarenakan ruang lingkup kewilayahan yang lebih terjangkau untuk dipimpin oleh kepala daerah dengan kemampuan managerial yang mumpuni.

Pilkada langsung juga merupakan sebuah transisi demokrasi yakni pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perhatian terhadap munculnya transisi demokrasi ini menurut Brian C Smith (1998) berawal dari sebuah keyakinan bahwa demokrasi yang terjadi di daerah merupakan syarat mutlak bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pemikiran ini berdasar pada

asumsi perbaikan demokrasi di tingkat daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai angin segar perubahan demokrasi di tingkat nasional. Beberapa alasan yang menjadi pendukung hal ini terlihat antara lain dengan adanya perubahan demokrasi pemerintahan di daerah yang merupakan suatu ajang pendidikan yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini berarti terdapat unsur *proximity* bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika proses demokratisasi berlangsung. (Ibid. Hal. 170)

Larry Diamond (1999) juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat vitalitas demokrasi. Diamond menjelaskan sejumlah alasan yang membuat pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan nilai-nilai dan keterampilan berdemokrasi di kalangan warganya. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Ketika hal ini terpenuhi, terdapat kecenderungan adanya tingkat keterwakilan demokrasi yang lebih baik. Pada akhirnya, pemerintah daerah mampu mendorong terwujudnya *checks and balances* di dalam kekuasaan. (Ibid. hal.171)

Fenomena Pilkada Sumatera Utara tahun 2013 menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam ketika melihat fenomena yang terjadi di Kota Medan melalui hasil rekapitulasi dari KPUD Kota Medan memperlihatkan bahwa dari 2.121.551 pemilih terdaftar, hanya

36,62% saja yang memberikan hak pilihnya. Hasil ini merupakan salah satu angka golput tertinggi selama penyelenggaraan Pilkada langsung di Indonesia. Dari 5 pasangan calon yang ikut dalam proses kontestasi politik, yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak adalah pasangan nomor urut

5 yaitu: H.Gatot Pujo Nugroho,ST dan Ir. H.Tengku Erry Nuradi,M.Si dengan perolehan suara: 279.156 suara sah. Namun khusus di Kota Medan ini yang menjadi pemenang di sisi yang lain adalah Golput yang berjumlah 63,38%. (Lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Kandidat Kepala Daerah Sumatera Utara 2013 di Kota Medan.

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1.	H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM – Ir.H.Soekirman	177.082
2.	Drs. Efendi MS. Simbolon – Drs. H. Jumiran Abdi	193.241
3.	Dr.H.Chairuman Harahap,SH,MH – H.Fadly Nurzal,S.Ag	45.905
4.	Drs.H.Amri Tambunan – Dr.R.E.Nainggolani,MM	61.962
5.	H.Gatot Pujo Nugroho,ST – Ir.H.Tengku Erry Nuradi,MSi	279.156
Jumlah Suara Sah		757.346
Jumlah Suara Tidak Sah		19.574
Jumlah Suara Sah + Tidak Sah		776.920 (36,62 %)
Jumlah Golput		1.344.631 (63,38 %)

Sangat sedikit kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki legitimasi kuat karena sistem penetapan calon terpilih termasuk ringan. Dengan pasangan calon yang rata-rata di atas dua pasangan kepala daerah, kemenangan diraih dengan cukup dengan suara terbesar (*first pass the post*). Bukan suatu kebetulan jika kemudian pejabat lama (*incumbent*) lebih berpeluang memenangi kontestasi pilkada dibandingkan para penantang (*challenger*). Besaran presentase kemenangan pasangan calon dapat dibaca pada Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 107 UU No.12 Tahun 2008:

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Rumusan Masalah

Penelitian ini digerakkan oleh keinginan untuk memahami tentang

perilaku tidak memilih (Golput) di Kota Medan. Maka pertanyaan yang diajukan adalah: Mengapa Golput bisa sangat tinggi di Kota Medan pada Pilkada Sumatera Utara 2013 yang lalu?

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, akan dituturkan dalam prosesnya dengan menjelaskan melalui pertanyaan turunan: “Bagaimana Golput dapat dijelaskan dan dipahami dari perspektif perilaku memilih sebagai konsekuensi dari tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat di Kota Medan?”

Tujuan Penelitian

Kajian penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi alasan kuat bagi masyarakat di Kota Medan ketika memilih Golput sebagai pilihan ekspresi politiknya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang golput tersebut serta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang menarik karena menganalisis permasalahan Golput dari perspektif pilihan yang tentu saja bukan pilihan yang tanpa sadar dan pertimbangan yang argumentatif.

Konsep Teori

Kerangka teori yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan dan menghubungkan konsep-konsep kunci penelitian dalam menemukan permasalahan penelitian, sehingga diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menemukan data dan menarasikan hasil temuan secara argumentatif. Menggunakan teori dalam penelitian juga berguna untuk membantu menjelaskan fokus penelitian agar dapat memberikan jawaban yang tepat berdasarkan rumusan masalah dan

tujuan penelitian yang diajukan. Untuk mengkerangkai dan menganalisis penelitian tentang perilaku Golput ini, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perilaku Memilih dan *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional).

Perilaku Memilih

Teori perilaku memilih menurunkan pemahaman konsep bahwa ketika seseorang memutuskan untuk tidak memilih, maka itu juga adalah sebuah pilihan. Oleh sebab itu, Teori ini juga dapat dipakai dalam menganalisis Golput itu sendiri yang tentunya akan sangat berkaitan dengan sikap dan motivasi dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa sikap merupakan ungkapan perasaan dari seseorang tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, Sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan seseorang terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut terhadap situasi yang sedang atau yang pernah dirasakan.

Motivasi biasanya muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang diberi hak untuk memilih. Namun di sisi yang lain, kebutuhan sendiri muncul karena masyarakat merasakan tidak nyaman antara yang seharusnya dirasakan dengan yang sesungguhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebutlah yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang kemudian akan berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kolektif. Mereka melihat bahwa sebabnya adalah apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan maupun kelompok secara langsung, walaupun

mungkin hal tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Sebab para kandidat yang terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal dan situasi, mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Dalam konteks pilkada, para pemilih yang mempunyai pemikiran, pengalaman dan pemahaman tentang politik seperti itu akan merasakan keterasingan secara aktif sehingga akan cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya dan menganggap pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan seseorang.

Fenomena perilaku maupun sikap juga mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek akan mempengaruhi perilaku atau tindakannya terhadap lembaga tersebut dimana dalam hal ini terhadap pemerintah, kandidat, dan partai politik yang mengusung para calon kandidat. Model sikap multiatribut inilah yang menjelaskan bahwa sikap dan perilaku memilih terhadap suatu objek sikap (kandidat dan partai politik) sangat ditentukan oleh sikap pemilih terhadap berbagai indikator yang dievaluasi. Bentuk perilaku ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai ekspresi protes terhadap pihak pemerintah atau partai yang sedang berkuasa serta lembaga-lembaga demokrasi lainnya yang dianggap belum mampu untuk mengakomodasi kepentingan dari masyarakat yang menjadi konstituennya. Meskipun demikian perilaku memilih menjadi sebuah objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan sosial dan politik, termasuk perilaku memilih di Indonesia.

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Asumsi dari teori pilihan rasional ini berangkat dari ekonomi politik, dimana semua orang itu punya tujuan dalam hidupnya sehingga semua aktor itu dikatakan rasional. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung-rugi yang menjadi dasar dari setiap tindakannya. Namun tidaklah cukup ketika hanya mendefinisikan pilihan rasional sebatas aspek untung rugi semata. Rasional juga berarti ketika seseorang secara independen bebas dari pengaruh luar dalam menentukan keputusannya. Independen dalam hal ini berarti tidak adanya tekanan, pengaruh, ataupun paksaan dari pihak lain apabila seseorang menentukan pilihannya. Dengan kata lain, pilihan tersebut bebas dari konsekuensi dari yang ditimbulkan apabila seseorang memilih melakukan tindakan tertentu. Cara berpikir itulah yang dipakai oleh mazhab *rational choice*. Jadi jikalau kita tahu tujuannya dan nilai-nilai yang diadopsi, maka itulah yang menjadi pilihannya dan tentunya ada cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Ada sekian banyak variasi yang tersedia dan masing-masing orang itu punya urutan referensi, dimana hal ini merupakan pinjaman dari ilmu ekonomi sehingga kelemahan dan kekuatannya juga terdapat disitu. Golput dalam hal ini tentu dapat diasumsikan sebagai bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat seperti bagi kalangan muda, yang tentu saja tujuannya bukan untuk menjadi pengikut dari salah satu aliran politik tertentu, tetapi untuk membuat orang dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi lingkungannya dengan tujuan untuk menjaga tradisi berdemokrasi. Dalam situasi apapun juga, pendirian yang berbeda dari tiap individu harus selalu dilindungi sehingga tidak ada lagi kekuasaan yang tanpa batas. Keniscayaan yang sudah bisa diantisipasi yang membuat

asumsinya adalah baik bagi seseorang akan berpengaruh baik juga bagi orang lain. Asumsi yang lain adalah orang itu diasumsikan *selfish* (egoisme kolektif) yang akhirnya dapat menghasilkan tertib sosial dimana diperlukan kepastian demi memudahkan diri sendiri, sehingga orang mematuhi peraturan karena dinilai ada manfaatnya dan bukan karena legalitas ataupun adanya paksaan. Ketika itu diterima sebagai asumsi dasar, Golput juga bisa diperhatikan dari proses pembentukan legitimasi sistem politik sebagai wujud protes terhadap sistem politik yang tidak mengaktualisasikan pengembangan demokrasi yang signifikan karena didasarkan pada banyak pertimbangan yang harus dieksplorasi karena masih ada banyak pula pertimbangan-pertimbangan yang belum diartikulasikan secara terungkap.

Dalam konteks Pilkada, ada nasehat yang mengatakan: “Pilihlah salah satu kandidat yang paling berkualitas dari semuanya yang tidak berkualitas”. Sebagai contoh: Kalau ada lima calon gubernur yang tidak berkualitas, masing-masing Si A dengan nilai 50, B 40, C 30, D 20 dan E 10, maka kita dianjurkan untuk menjatuhkan pilihan pada Si A yang punya nilai tertinggi, yaitu 50. Hal ini tentulah merupakan sesat logika karena semuanya di bawah standar yang berarti “tidak lulus” atau tidak sesuai harapan untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas. Selain itu, ajakan untuk memilih secara spekulatif, berdasarkan “ilmu kira-kira seperti ini”, yang tidak berdasarkan kualitas yang bisa dipertanggung jawabkan, maka bisa berarti berpotensi memilih calon yang koruptor dan merupakan cara memilih yang sesat logika. Oleh sebab itu pilihan untuk golput merupakan keniscayaan logika yang jernih bagi orang yang memiliki rasionalitas dalam melihat dan mengetahui kualitas kandidat yang ikut

berkontestasi.

Asumsi yang dibangun dalam pendekatan rasional adalah ketika masyarakat memiliki kecenderungan berubah dalam menentukan pilihan dari pemilihan satu ke pemilihan lain dalam periode tertentu. Menurut pendekatan rasional, masyarakat memiliki rasionalitas yang tinggi dan melakukan penilaian objektif terhadap partai politik atau orang yang akan dipilih dengan harapan mereka memilih bukan karena faktor ketidaksengajaan tetapi untuk kepentingan umum. Demokrasi memang idealnya dipandang harus memenuhi salah satu syarat utama yaitu *rational choice*. (Riswanda Imawan, Silabus Mata Kuliah SKPI JIP Fisipol UGM). Adapun teori Downs menurut Imawan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat berperilaku rasional sesuai dengan kepentingan individu masing-masing
- Preferensi kebutuhan memilih dapat digambarkan pada skala kiri dan kanan
- Opini publik membentuk lonceng karena suara masyarakat berkumpul di tengah (mengambil posisi aman)
- Partai politik mengontrol pemerintah dengan cara mengontrol pemilihan umum yang berjalan.

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keputusan memilih dari masyarakat terlebih pada lingkup lokal yang harus didasarkan pada pilihan rasional sehingga setiap orang dalam melakukan sesuatu pasti berawal dari melakukan sebuah pertimbangan untuk menentukan tindakannya. Asumsi yang dibangun dalam pendekatan rasional choice adalah bahwa pemilih bukannya

wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari kemauan dalangnya. Pendekatan inilah yang dipelopori oleh Anthoni Down (1957) yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal penting, yakni orientasi isu dan kandidat (figur). Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat (figur) tanpa mempedulikan label partainya dan kemudian disinilah moment pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menjelaskan dan mengeksplorasi bagaimana perilaku tidak memilih (golput) di Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat *Intrinsic case study* yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang perilaku tidak memilih masyarakat di kota Medan, Sumatera Utara. Posisi peneliti terhadap data yang didapat dari eksplorasi narasumber tersebut adalah bersifat menginterpretasikan data, sehingga diharapkan dapat menjelaskan persoalan secara komprehensif argumen dan alasan dari para pemilih yang Golput tersebut. Di dalam keperluan yang berkaitan dengan proses mendapatkan data tersebut, maka peneliti tidak bisa terpisah dari informannya. Hal ini sesuai dengan metodologi kualitatif yang ditegaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. (Moleong, Lexy

J, 2008).

Beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan studi kasus adalah karena fokus kajian yang diteliti merupakan kasus tunggal secara menyeluruh yang menjadi representasi ketika memahami pilihan Golput itu bisa dikaji dari sudut pandang yang dinamis. Selain itu, pemilihan studi kasus sebagai metode penelitian dinilai sangat cocok untuk mendapatkan data serta mengeksplorasinya secara lebih mendalam. Pengujian terhadap teori dilakukan dengan cara mendeskripsikan dengan jelas melalui proses eksplorasi mengenai bentuk kerjasama yang terjalin antar multiaktor tersebut dan mencari tahu motivasi atau kepentingan di balik berlangsungnya kerjasama yang telah dibangun. Selain itu, tujuan penelitian yang ingin menegaskan bekerjanya teori yang digunakan dapat digambarkan dengan jelas ketika peneliti mampu melakukan eksplorasi pemahaman tentang pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Baru.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang merupakan operasionalisasi dari metode *thick description* yang ditawarkan oleh Geertz. Analisis dalam metode ini merupakan proses perkiraan terhadap makna, pemetaan pikiran dan melukiskannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan empat proses tahapan analisis, yaitu: Penyeleksian data (*data reduction*), pengorganisasian data (*data display*), verifikasi data dan kesimpulan (Carollyn Ellis dan Arthur P. Bochner, 2013). Langkah pertama adalah penyeleksian data untuk memilih data yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian. Data-data yang

didapat dalam penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah disusun berdasarkan menggunakan teori yang telah disediakan. Dalam tahapan ini, data yang mendukung untuk menjawab tujuan penelitian lah yang digunakan. Langkah kedua adalah eksplorasi data, yaitu usaha untuk menggali atau memperjelas data yang sudah ada. Langkah ketiga adalah verifikasi data, yaitu usaha pembuktian kebenaran data yang tersaji. Dalam proses ini, data yang satu diperbandingkan dengan data sumber yang lain untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tema penelitian. Langkah yang ke empat adalah penyimpulan, yakni penggambaran makna dari data-data yang sudah diverifikasi. Pada bagian ini, penafsiran dan analisis dari peneliti sangat dibutuhkan dengan melakukan konfirmasi pada literatur-literatur yang relevan sebagai penguat dan penjelas penafsiran. Penafsiran data terlebih dahulu diawali dengan pemaknaan data, penjelasan pola hubungan antar konsep dalam pengertian, sehingga penafsiran penulis bukanlah sebuah kebenaran mutlak.

Oleh karena itu, untuk menguji kebenaran dan validitas, data dianalisis serta diperkuat dengan metode teknik triangulasi data, yang berarti mengadakan *cross and check* antara sumber data maupun narasumber satu dengan yang lain, hal ini dimaksudkan agar data dapat terinterpretasi secara mendalam sehingga signifikansi kesimpulan analisis penelitian dapat diperoleh.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Seorang kepala daerah memang diharuskan memiliki legitimasi yang kuat karena dengan demikian kepala daerah terpilih itu memiliki keabsahan dari segi moral dan etika dalam

melaksanakan kebijakannya di hadapan rakyatnya. (Sigit Pamungkas, 2009). Logika itu memang harus dijunjung tinggi karena kepala daerah merupakan representasi dari masyarakat daerahnya yang harus berjuang mensejahterakan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka untuk memimpin. Namun ironi yang seringkali terjadi adalah rakyat yang telah memberikan legitimasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ini mengalami akumulasi kekecewaan, maka kepala daerah diharapkan dapat lebih peka dan responsif terhadap keinginan rakyat. Sebab apabila janji yang diberikan kepada konstituen pada saat kampanye tidak dipenuhi, maka itu akan menjadi hutang yang akan ditagih masyarakat ketika pemilihan periode yang selanjutnya.

Logika legitimasi moral etika inilah yang ingin dihubungkan dengan kuantitas partisipasi dalam pilkada yang ingin direbut oleh para kandidat untuk melegalkan posisinya baik dari aspek hukum legal formal maupun dari etika-moral sebagai pejabat publik yang telah menjadi representasi dari masyarakat khususnya dalam konteks menjadi kepala daerah. Dengan demikian, bagi mereka, meningkatnya angka golput umumnya dipandang akan mengurangi derajat legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Semakin tinggi angka golput atau perilaku tidak memilih di kalangan yang memiliki hak suara maka semakin rendah derajat legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, semakin rendah angka perilaku tidak memilih semakin tinggi pulalah tingkat legitimasi pemerintahan dan institusi-institusi politik dalam demokrasi. Pada titik inilah keterkaitan antara perolehan suara dengan basis legitimasi politik menjadi penting dan relevan untuk ditelaah tepatnya dari sisi moral dan etika politik.

Secara historis, fenomena tidak

ikut memilih atau golput ternyata tidak monolitik karena setiap orang yang golput ternyata memiliki justifikasinya sendiri dimana terdapat beragam argumentasi yang menyebabkan orang menjadi golput. Beberapa motivasi pokok diantaranya dapat dilihat sejak pemilu yang pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955. Dinamika politik saat itu cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara kaum *unitaris* dengan kaum *federalis* yang telah menyeret masyarakat pada suasana yang cukup dilematis, sehingga timbullah pemikiran dan keputusan yang berpandangan bahwa lebih baik untuk tidak memilih daripada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih. Hal tersebut juga didukung adanya faktor dari ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu. (Abdurrahman Wahid, 2009).

Istilah Golput semakin gencar disuarakan sebagai sebuah gerakan pada saat menjelang pemilu 1971. Istilah ini sengaja dicetuskan oleh Arief Budiman yang memproklamasikan Golput pada tanggal 3 juni 1971 di Balai Budaya Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI yang sepenuhnya memberikan dukungan politis terhadap Golkar. Hal ini terjadi karena arogansi yang dilakukan oleh rezim orde baru pada saat itu yang melakukan pemaksaan maupun ancaman pada seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarganya untuk sepenuhnya memberikan pilihan dan dukungan pada Golkar. Pada saat itu, Arief Budiman menghimbau dan mengajak masyarakat untuk Golput dengan cara mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Namun ketika melakukan pencoblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik melainkan pada bagian yang berwarna putih agar suara menjadi tidak sah.

Menurut Arbi Sanit, golput lebih merupakan gerakan kultural sebagai upaya untuk menegakkan suatu tradisi/kultur cara bermasyarakat yang sehat (Arbi Sanit, 1992).

Keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi akan muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang diberi hak untuk memilih. Namun di sisi yang lain, kebutuhan sendiri muncul karena masyarakat merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dengan yang sesungguhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebutlah yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang kemudian akan berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kolektif. Mereka melihat bahwa sebabnya adalah apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan maupun kelompok secara langsung, walaupun mungkin hal tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Para kandidat yang terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik dalam banyak hal dan situasi. Mereka juga berada jauh di luar jangkauan para pemilih dan konstituennya. Dalam konteks pilkada, para pemilih yang mempunyai pemikiran, pengalaman dan pemahaman tentang politik seperti itu akan merasakan keterasingan secara aktif sehingga akan cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya dan menganggap pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan seseorang.

Sekilas Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Pada jaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera* yang meliputi seluruh Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur berkedudukan di Medan. Sumatera Utara terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan. Pada Sidang I Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera diputuskan untuk dibagi menjadi 3 sub Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah dan sub Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948 pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan dan pada tanggal 15 selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang intinya Provinsi Sumatera Utara wilayahnya dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah Otonomi Provinsi Aceh. (www.kemendageri.go.id)

Sekilas Sejarah dan Profil Kota Medan

Medan merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan sebelumnya sering disebut dengan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan. Namun setelah berlakunya Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyebutan nama daerah Tingkat II Kotamadya Medan berubah menjadi daerah Kota Medan. Sebagai pusat pemerintahan daerah Sumatera Utara, Kota Medan tumbuh menjadi kota metropolitan dengan luas 265,10 Km dan berpenduduk kurang lebih 2.465.469 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.681/Km. (BPS Kota Medan). Pada saat ini sebagian besar penduduk Kota Medan terdiri dari suku maupun etnis Jawa, Batak, Melayu, Minangkabau dan Aceh. Selain itu ada juga terdapat warga keturunan Tionghoa dan India. Medan yang merupakan daerah Pemerintahan Tingkat I Sumatera Utara ini berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang disebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan.

Menurut Sinar L (2011:52) kota Medan merupakan kota yang pertama kali dibangun oleh Belanda diluar Pulau Jawa pada tahun 1830-an. Selain itu Kota Medan merupakan salah satu kota yang termaju di Indonesia pada masa itu dalam hal infrastruktur maupun sarana dan prasarana seperti sarana transportasi kereta api, instalasi air bersih, pelabuhan dan jaringan telepon.

Pembangunan infrastruktur ini tidak terlepas dari peran penting perusahaan perkebunan swasta terbesar di Sumatera yaitu Deli Maaschappij dalam mengembangkan Kota Medan (Passhier, 1995). Pengaruhnya terlihat jelas dari karakteristik dan ciri khas Kota Medan sebagai kota kolonial dengan tata kota berdasarkan segregasi etnis dan status sosial beserta ratusan koleksi bangunan lama yang memiliki arsitektur yang sangat khas.

Kota Medan saat ini telah mengalami kemajuan dan pembangunan yang sangat pesat. Sebagai pusat Pemerintahan Daerah Sumatera Utara, Medan tumbuh menjadi Kota Metropolitan dengan berpenduduk kurang lebih 2,5 juta jiwa. Saat ini Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan merupakan salah satu dari kota-kota yang memiliki banyak peninggalan masa lalu yang kental dengan kekayaan budaya dan arsitektur bangunan bersejarah. Kota Medan merupakan kota multietnis yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara tentu memiliki peranan penting dalam konstelasi ekonomi di Pulau Sumatera. Kota ini merupakan kota perdagangan dan hubungan penerbangan internasional terpenting yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sehingga bukan sesuatu hal yang berlebihan jika menyebutkan kota ini sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara.

Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan mengalami dinamika pesat yang ditandai dengan penambahan penduduk yang tinggi serta laju pertumbuhan ekonomi yang

cukup baik. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Medan, Kota Medan memiliki laju pertumbuhan ekonomi dengan tren positif dalam kurun waktu tahun 2007-2011. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama yaitu sebesar 6,29 persen. Hal ini tentu sebuah prestasi pada sektor ekonomi nasional yang cukup membanggakan.

Sistem Kekerabatan dalam Etnis Batak

Dalam sistem kekerabatan adat Batak, dikenal adanya istilah *marga*. Istilah Batak tersebut kini telah resmi menjadi bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus resmi yang berarti kelompok kekerabatan yang eksogen dan unilinear, baik secara matrilineal maupun patrilineal. Menurut Hutauruk (1987) etnis Batak dapat dikelompokkan ke dalam lima sub suku yang saat ini menempati daerah-daerah tertentu di Provinsi Sumatera Utara dengan pembagian sebagai berikut: Batak Toba, Pakpak/Dairi, Angkola-Mandailing, Karo, dan Simalungun. (M. Hutauruk, 1987). Pembagian etnografis etnis Batak didasarkan atas dialek bahasa Batak yang umumnya terdiri dari dua yaitu: Dairi (termasuk dalam bahasa Pakpak dan Karo). Yang kedua adalah bahasa Toba, dimana Toba dipertimbangkan sebagai induk semua dialek bahasa Batak. (Edwin M. Loeb, 1972)

Dalam adat Batak, sistem hubungan kekerabatan di atas dikenal dengan istilah *Dalihan na Tolu*. Semua tatanan posisi di dalam adat istiadat telah diatur dalam falsafah etnis Batak yang masih terus terjaga dan diterapkan sampai saat ini. Falsafah masyarakat Batak yang dikenal sebagai *Dalihan Natolu* ini berfungsi sebagai hukum adat Batak yang mempunyai arti: Tiga

tumpuan, yang dimaknai sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak. Tanpa *Dalihan Natolu* hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat sampai saat ini. Berdasarkan prinsip tersebut, diantara anggota masyarakat Batak berlaku sistem perkawinan yang bersifat eksogami, yaitu seorang pria Batak tidak diperbolehkan menikahi wanita yang semarga dengannya.

Dalihan Natolu ini juga berfungsi sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat karena selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. *Dalihan Natolu* tersebut meliputi :

1. *Somba Marhula-hula* (Hormat kepada pihak istri)
2. *Elek Marboru* (Walaupun sangat dihormati oleh pihak suami, pihak istri tidak boleh bertindak semena-mena terhadap keluarga pihak suami)
3. *Manat Mardongan Tubu* (Bersikap hati-hati dan sopan terhadap teman atau saudara semarga).

Sikap hidup masyarakat Batak di bawah ikatan prinsip *Dalihan na Tolu* tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Manik (1977):

Golongan *hula-hula* harus dihadapi dengan sikap dan kelakuan yang hormat dan keinginan mereka sedapat mungkin harus dipenuhi; golongan *Dongan Sabutuha* dianggap sama dengan diri sendiri; sedangkan dari *Boru* dapat diharapkan kewajiban yang sama seperti kewajiban yang harus dipenuhi terhadap *hula-hula* sendiri.

Bila ditinjau dari garis keturunan maka suku Batak adalah patrilineal, sedangkan suku Melayu adalah parental (keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Pada masyarakat suku Batak, Nias maupun Melayu ada upacara adat siklus kehidupan dari lahir, masa dewasa sampai kematian, seperti upacara turun mandi, pemberian nama, potong rambut, mengasah gigi, perkawinan dan upacara pemakaman jenazah. Di masyarakat Batak dikenal upacara memberi makan oleh anak kepada orang yang lanjut usia (sulang-sulang). Terdapat juga upacara penggalan/pemindahan tulang belulang kesuatu tempat atau tugu yang disebut *mangongkal holi*. Setiap upacara-upacara adat masyarakat Batak selalu disertai dengan pemberian Ulos dan tarian atau *manortor*.

Budaya etnis Batak memiliki perbedaan dengan budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Mulai dari adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang batak itu sendiri. Dalam adat istiadat Batak tidak mengenal sistem kasta seperti pada budaya-budaya lain yang ada di Indonesia sehingga tidak ada marga-marga tertentu yang lebih tinggi atau rendah dari marga lainnya sehingga harus saling menghormati satu sama lain.

Profil Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Pilkada Sumatera Utara 2013.

Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara merupakan sistem yang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Suatu kelompok yang mengemuka dan hampir pasti dimiliki oleh tiap-tiap pasangan kandidat adalah tim sukses yang merupakan tim dibelakang layar para kandidat bagi

suksesnya pasangan calon kepala daerah untuk menduduki tahta pemerintahan. Para anggota dari masing-masing tim sukses ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dalam membawa calon kandidatnya dalam menuju kursi kepala daerah Sumatera Utara. Ada yang menitikberatkan strateginya dengan memperhatikan kultur masyarakat Kota Medan yang masih mengedepankan kesamaan etnis dalam memilih pemimpin. Di sisi yang lain, ada yang mengedepankan bagaimana tujuan untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih calon kandidat yang diusung dengan mengenalkan sosok pribadi dari kandidat. Bahkan ada yang lebih menekankan strategi penggalangan massa dengan metode dialogis. Tentu saja harapan dari seluruh masyarakat adalah ketika calon kepala daerah tersebut terpilih, maka program dan rencana yang dijanjikan oleh para calon tersebut seperti penegakan hukum, keamanan lahir dan batin serta dapat membawa aspirasi masyarakat dapat terwujud.

Demokratis atau tidaknya Pilkada langsung tidak saja ditentukan dari kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, banyak faktor yang menjadi parameter demokratis atau tidaknya pengaturan Pilkada langsung, khususnya pengaturan rekrutmen calon kepala daerah di Sumatera Utara. Salah satunya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan memberikan peluang kepada semua warga negara untuk melaksanakan *right to vote and to be candidate* secara adil. Dalam konteks *to be candidate*, apabila dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, secara implisit UUD 1945 memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Kesempatan itu dapat dibaca dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

yang tidak mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. (Saldi Isra, 2005).

Kuatnya legitimasi kepala daerah terpilih sejatinya hanyalah konsekuensi Pilkada langsung. Walaupun rakyat yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi partai politik masih memiliki pengaruh yang sangat besar karena partai politiklah yang dapat menentukan apakah setiap pasangan calon bisa maju atau tidak dalam pemilihan umum. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya limabelas persen dari jumlah kursi di DPRD di daerah yang bersangkutan dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan. (PP No.6 Tahun 2005 Pasal 36 ayat 2). Masalah yang mendesak untuk perlu dicermati adalah posisi partai politik sebagai pengusul calon telah mereduksi kompetisi Pilkada. Partai politik tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. (Pasal 11 ayat 1 UU No.2 tahun 2008). Seharusnya, partai politik dapat memposisikan diri sebagai institusi utama dalam proses Pilkada langsung, sehingga jumlah Kepala Daerah terpilih dari kalangan non-partai politik (bukan kader atau aktifis partai politik) akan sangat besar.

Pilkada Sumatera Utara tahun 2013 diikuti oleh lima pasangan kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Berdasarkan nomor urut, profil mereka adalah sebagai berikut:

1. Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman.

Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur

Sumatera Utara nomor urut satu. Gus Irawan Pasaribu adalah seorang ekonom dan banker yang terkenal di Sumatera Utara. Lewat Bank Sumut yang dipimpinnya selama tiga periode, Gus mengahdirkan program-program yang mengacu pada ekonomi kerakyatan. Di bawah kepemimpinannya Bank Sumut menjelma sebagai Bank yang diperhitungkan. Jauh lebih solid dibanding saat masih bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU). Di kalangan intelektual, ia dikenal luas karena sering mengisi kolom di berbagai media. Tulisan-tulisan Gus sebageian besar memang berfokus pada bidang ekonomi. Namun kadangkala ia juga menulis perihal sosial, budaya, politik, dan olahraga.

Di akhir periode ketiganya sebagai pemimpin Bank Sumut, Gus disebut-sebut akan mencoba peruntungan di panggung politik untuk membidik kursi Gubernur Sumut. Hingga pada akhirnya Gus “lengser” dari Bank Sumut dan sepenuhnya menjalani profesi sebagai *entrepreneur*, selentingan ini tidak pernah dibantah atau juga dibenarkan. Namun pada akhirnya, wacana tersebut terbukti kebenarannya setelah Gus Irawan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai salah seorang calon kandidat yang ikut berkontestasi yang kemudian berpasangan dengan Soekirman, Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.

Soekirman adalah seorang insinyur pertanian alumnus Universitas Sumatera Utara. Bertahun-tahun sebelum masuk ke jajaran birokrasi Kabupaten Serdang Bedagai, ia bekerja sesuai disiplin ilmu. Ia juga bergabung dengan sejumlah *NGO (Non Government Organization)* yang bergerak di bidang wisata dan lingkungan hidup. Dua periode menjadi Wakil Bupati, tak lantas membuat

Soekirman puas menjadi birokrat. Ia dikenal rajin blusukan ke pelosok-pelosok kampung dengan mengenakan pakaian tidak resmi dan mengendarai sepeda motor butut. Ia mampir ke lahan pertanian, mengobrol dengan petani atau warga di kedai-kedai kopi.

Gus Irawan Pasaribu - Soekirman (GusMan) mengusung slogan “Sumut Sejahtera untuk Kita Bersama”. Pasangan Gus Man ini diusung oleh 22 partai politik yang duduk di parlemen dan nonparlemen dengan jumlah total perolehan melebihi 15 persen dari total suara sah dalam pemilu 2009, yaitu: Gerindra, PAN, Barnas, PBB, Partai Buruh, PDK, PIS, PKPB, PKP, PKB, PK, PKDI, PMB, Partai Merdeka, PNBK, Partai Pelopor, PPI, PPDI, PKBIB, PKNUI, PDP dan PBR.

2. Effendi Muara Sakti Simbolon dan Djumiran Abdi.

Dibandingkan dengan partai-partai politik lain, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan termasuk yang paling belakang dalam menentukan calon yang akan diusung ke pertarungan Pilkada 2013. Kandidat ini ditentukan sehari sebelum tenggat waktu yang ditentukan KPU Provinsi Sumatera Utara berakhir. Effendi Simbolon akhirnya menjadi pilihan dari PDI-Perjuangan. Sebuah pilihan yang mengejutkan karena sebelumnya, nama Effendi hampir tidak pernah disebut-sebut. Anggota DPR RI ini bahkan tidak ikut mendaftar ke bursa calon kandidat PDI-Perjuangan. Sebelum masuk ke arena politik, Effendi lama berkulat sebagai pebisnis. Kecakapannya membuat dia dipercaya menangani sejumlah perusahaan besar. Sukses di bidang bisnis, Effendi mencari tantangan baru di panggung politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Effendi berpasangan dengan Djumiran Abdi sebagai calon Wakil Gubernur.

Djumiran Abdi adalah birokrat sejati pada saat memulai karier dari tingkatan terbawah setelah lulus dari APP APIPSU Medan tahun 1974. Djumiran telah menyinggahi hampir seluruh pos birokrasi di jajaran Pemerintahan Kota (Pemko) Medan. Dari mulai Kepala bagian, Kepala Dinas, hingga Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan daerah (PD). Pensiun sebagai pegawai negeri sipil, Djumiran Abdi merambah dunia politik. Ia antara lain pernah menjabat sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Sebelumnya, ia pernah menjadi pengurus DPD II Golkar Medan selama Sembilan tahun (1984-1993).

Effendi-Djumiran (ESJA) mengusung slogan “Sumut Lebih Berwarna: Bersih, Berwibawa, Sejahtera dan Berguna”. Pasangan ini diusung oleh tiga koalisi partai politik yaitu: PDI-Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai damai Sejahtera (PDS).

3. Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal.

Chairuman bukanlah nama asing bagi masyarakat Sumatera Utara. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pada tahun 2001. Dengan tanggungjawab tersebut, ia menuntaskan banyak kasus. Dua tahun berselang, ia dicalonkan sebagai Gubernur Sumut namun kalah suara dengan selisih tipis dari Tengku Rizal Nurdin. Pada waktu itu mekanisme Pilkada belum dilakukan lewat pemilihan langsung. Kalah dalam pemilu tersebut tidak serta merta membuat karier politiknya terhenti. Sebaliknya, justru kian bersinar. Ia menggeliat di panggung politik nasional. Selain anggota DPR RI, Chairuman pernah dipercaya sebagai Deputy Menkopolkam Bidang Hukum dan HAM pada tahun 2006-

2008. Chairuman berpasangan dengan Fadly Nurzal.

Fadly Nurzal adalah seorang politisi yang lahir dan tumbuh di era reformasi. Fadly kerap mengatakan bahwa ia adalah politisi angkatan 1998. Mengawali karier politik dari kampusnya, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut, Fadly merupakan “*rising star*” dari PPP. Ia melanjutkan trah keluarganya karena Ayah dan Ibunya, HM Noor Pohan dan Hj Zaleha HAS, adalah politisi partai berlambang Kabah ini. Namun karier Fadly yang menanjak dalam kurun waktu seingkat bukan disebabkan oleh faktor trah, melainkan karena kecakapannya dalam berpolitik. Meski masih muda, ketokohnya diakui oleh para politisi PPP yang masih senior. Selain anggota DPRD Sumut, Fadly yang pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut ini juga merupakan Ketua DPW PPP.

Chairuman Harahap-Fadly Nurzal (CH-Fadly) mengusung slogan “Membangun dari Desa”. Slogan yang sama dipakai oleh Partai Golkar untuk Pemilu di seluruh Indonesia, termasuk Pemilu Presiden. Pasangan ini diusung oleh Partai politik pengusung yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Republik Nusantara (PPN).

4. Amri Tambunan dan Rustam Effendi Nainggolan.

Di antara seluruh partai politik pengusung calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumut 2013, hanya Partai Demokrat yang mengusung kandidat tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lain. Hampir bersamaan dengan PDI-Perjuangan, Partai Demokrat yang memiliki 27 kursi di DPRD Sumut baru menentukan kandidat mereka di detik-detik akhir

jelang tenggat yang ditetapkan KPU. Dari seluruh figure yang masuk di bursa calon, Partai Demokrat akhirnya memilih Amri Tambunan, Bupati Deliserdang. Amri Tambunan adalah seorang Birokrat. Kariernya dimulai dari Kantor Kecamatan Medan Johor pada tahun 1979, karier Amri memuncak pada medio 1999-2004, ketika ia secara beruntun menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan dan Kepala Infokom Sumut. Ia kemudian mengikuti Pilkada Deliserdang dan menang sehingga menjadi Bupati Deliserdang selama 2 periode (2004-2014). Amri Tambunan berpasangan dengan Rustam Effendi (RE) Nainggolan sebagai calon Wakil Gubernur Sumut.

Rustam Effendi (RE) Nainggolan adalah seorang birokrat “kaliber berat” yang selama bertahun-tahun telah menduduki berbagai jabatan penting di Sumatera Utara. Penunjukan RE nainggolan sebenarnya cukup mengejutkan banyak orang. Sebab sebelumnya mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara ini digadang dan diusung oleh dua partai lain sebagai calon Gubernur Sumut. Namun menjelang penentuan nama calon, nama RE Nainggolan terlempar dari bursa. Birokrat yang memulai karier panjangnya dari jabatan staff Kantor Kecamatan Pahae Jae pada tahun 1976 ini justru diusung oleh Partai Demokrat sebagai calon Wakil Gubernur Sumut untuk mendampingi Amri Tambunan. Amri Tambunan dan RE Nainggolan mengusung slogan “Membangun dalam Kebhinekaan” yang diusung oleh Partai Demokrat.

5. Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

Gatot Pujo Nugroho mengawali karier sebagai akademisi di Politeknik Negeri Medan, namanya mencuat setelah ia dipilih sebagai Ketua Dewan

Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumut pada tahun 2005, menggantikan Muhammad Nuh. Meski aktif berpartai dimana dalam hal ini berdakwah bersama PKS, nama Gatot tidak tercantum dalam struktur organisasi partai. Amanah sebagai Ketua DPW PKS ini pada akhirnya membuat Gatot memutuskan berkiprah sepenuhnya sebagai politisi.

Tiga tahun kemudian, Gatot melepaskan jabatan ini setelah diminta mendampingi H. Syamsul Arifin di Pilkada Sumut 2008. Mengusung nama populer Syampurno, pasangan yang semula tidak terlalu diperhitungkan ini berhasil memenangkan Pilkada. Gatot kemudian ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut setelah Syamsul Arifin ditahan akibat kasus penyalahgunaan wewenang saat menjabat Bupati Langkat. Gatot Pujo Nugroho didampingi oleh Tengku Erry Nuradi sebagai calon Wakil Gubernur.

Tengku Erry Nuradi adalah adik dari mantan Gubernur Sumut Tengku Rizal Nurdin. Sebelum menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai, Erry yang merupakan kader partai Golkar Sumut ini lebih banyak berkarier di bidang bisnis. Sebagai pengusaha, ia pernah dipercaya memangku berbagai jabatan bergengsi. Di antaranya adalah Wakil Ketua Kadinda Medan dan Wakil Ketua DPD *Real Estate* Indonesia Provinsi Sumut. Kepemimpinannya bersama Soekirman di Sergai terbilang fenomenal. Potensi-potensi daerah dan peluang investasi digarap serius. Sejak dimekarkan dari Deliserdang, Sergai melesat sebagai satu diantara daerah Kabupaten-Kota terbaik di Indonesia. Gatot Pujo Nugroho – Tengku Erry Nuradi (Ganteng) mengusung slogan “Lanjutkan: Rakyat, Membangun, Melayani Sumut”. Pasangan ini diusung oleh lima partai politik yaitu: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Patriot, Partai Persatuan Nasional (PPN).

Terkait kontestasi politik yang berlangsung dalam pilkada Sumut, terdapat 3 indikator dominan yang berkorelasi langsung terhadap meningkatnya perilaku tidak memilih (golput). Beberapa diantaranya adalah faktor marga, agama dan isu putera daerah calon kandidat, akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, dan persoalan krisis listrik di Kota Medan dan sekitarnya.

Marga, Agama, dan Isu Putera Daerah Calon Kandidat.

Penerapan kebijakan tentang peraturan otonomi daerah yang luas telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan untuk mengatur atau mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya itu sendiri. Momentum politik seperti Pilkada juga menghadirkan beragam isu-isu yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam, salah satu diantaranya adalah isu putera daerah yang saat ini ternyata menjadi komoditas politik yang sangat strategis, terutama bisa digunakan sebagai nilai tambah untuk meraih suara dari para konstituen. Komunitas atau perkumpulan etnis batak juga tentunya tidak terlepas dari gambaran umum dari konsekuensi sosiologis dan politis dari kebijakan tersebut. Di dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat kota Medan masih menganggap bahwa faktor kesamaan etnisitas dan agama merupakan faktor penting untuk memilih seseorang menjadi pemimpin. Asumsinya adalah kedekatan etnis tersebut dianggap mampu memberi kedekatan emosional sehingga diharapkan ketika sudah terpilih, pasangan kandidat tersebut

tidak mudah lupa terhadap para konstituennya.

Dalam hal ini, ada fenomena yang menarik yang ditemukan dalam proses Pilkada Sumatera Utara 2013 yang lalu, dimana dari 5 pasangan calon yang ikut berkontestasi, ada 2 orang calon yang merupakan etnis batak toba beragama Kristen yang dianggap menjadi sumber konflik antar kelompok marga. Kedua calon tersebut yaitu Efendi Simbolon sebagai calon gubernur dari pasangan nomor urut 2 dengan RE.Nainggolan sebagai wakil gubernur dari nomor urut 4. Kedua kandidat ini dianggap memiliki nafsu kekuasaan yang mengakibatkan terpecahnya suara masyarakat Batak Kristen.

Kelebihan yang dimiliki oleh putera daerah diantaranya adalah menguasai adat istiadat, bahasa atau dialek batak yang merupakan etnis asli dari Sumatera utara. Kesamaan etnis tersebut juga berpotensi memiliki peluang yang besar dengan pengetahuan akan wilayah setempat yang tentu saja sangat membantu untuk jabatan eksekutif di pemerintahan daerah yang bersangkutan. Isu pokok yang beredar di masyarakat kota Medan khususnya etnis batak toba pada saat itu adalah bahwa Efendi Simbolon harus diusung karena merupakan satu-satunya orang batak yang beragama Kristen yang menjadi calon Gubernur Sumatera Utara 2013. Namun di sisi yang lain, Efendi Simbolon memiliki kelemahan yaitu dia bukanlah merupakan putera daerah kelahiran Sumatera Utara sehingga dianggap memiliki kelemahan bukan merupakan putera daerah asli. Sedangkan RE. Nainggolan memiliki keunggulan dari Efendi Simbolon karena merupakan putera daerah yang lahir dan besar di Sumatera Utara. Akan tetapi RE. Nainggolan ini memiliki

kelemahan karena hanya maju menjadi calon wakil gubernur. Pandangan dan asumsi yang mengatakan bahwa wakil gubernur hanya akan menjadi pendamping dari gubernur dan tidak bisa berbuat banyak di dalam pemerintahan menjadikan masyarakat etnis batak menjadi ragu untuk memilihnya karena kurang menyukai calon gubernur yang berpasangan dengan RE. Nainggolan. (Budi Sirait, 2015).

Pertarungan dua tokoh etnis batak ini ternyata memberikan dampak yang besar di kalangan akar rumput masyarakat etnis batak. Perbedaan pilihan politik berdampak pada terbentuknya akar konflik sebagai embrio perpecahan di kalangan persekutuan marga etnis batak. Oleh sebab itu, untuk mengambil jalan tengah dan menghindari konflik, golput dianggap sebagai pilihan yang paling aman untuk mengamankan diri dan kelompok dari kebencian organisasi atau kelompok marga lainnya. Kesadaran ini layak diapresiasi karena masyarakat etnis batak di Kota Medan menyadari bahwa dengan diusungnya kedua tokoh tersebut oleh partai politik, maka sebenarnya partai politik ingin memecah suara etnis batak di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

Akumulasi Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pilkada langsung mulai digelar setelah pemilu dan pemilihan presiden tahun 2004. Namun ternyata fakta yang terjadi adalah Pilkada langsung tidak secara otomatis membawa harapan bagi masyarakat yang semangat awalnya adalah berpengaruh langsungnya kehidupan masyarakat dari kebijakan-kebijakan kepala daerah. Proses demokrasi dalam pemilihan (*democratic elections*) itu tampaknya belum diikuti oleh demokrasi dalam regulasi pilkada

(*electoral law*) dan perumusan kebijakan (*democratic policy-making*). Kecenderungan ini sangat dirasakan terutama di tingkat daerah dalam hal ini Kota Medan. Setelah bergulirnya berbagai gagasan reformasi, demokratisasi dan desentralisasi, ternyata nasib rakyat tidak banyak berubah karena pembuatan kebijakan masih tetap bersifat elitis, kepentingan rakyat kurang diperhatikan. Sedangkan mekanisme kontrol terhadap perilaku pejabat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akumulasi kekecewaan dari masyarakat Kota Medan yang tidak lagi percaya pada kinerja pemerintah sehingga tidak mau terlibat didalamnya karena menganggap tidak dapat memberi teladan berupa pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Fenomena tingginya angka korupsi di Sumatera Utara sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Peranan Media Massa yang menampilkan riwayat dan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di lingkup pemerintahan Kota Medan juga ikut menjadi sarana yang memberikan informasi tentang kinerja dari Pemerintah Daerah karena media massa saat ini sudah memiliki kemampuan untuk memindahkan unsur-unsur yang menonjol dalam agenda beritanya kepada agenda publik. Media memiliki kekuatan untuk membentuk agenda khalayaknya sehingga menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan oleh mereka. Media itu sendiri melakukan *framing* terhadap realitas yang terjadi dan dihadapi masyarakat dengan mengangkat sebuah isu dan dalam pemberitaannya tentu saja dipengaruhi oleh sistem-sistem yang berinteraksi dengan masyarakat.

Informasi yang diterima oleh masyarakat inilah yang menjadi sarana

munculnya keinginan untuk golput dikarenakan maraknya pemberitaan dari sisi yang negatif bagi pejabat negara khususnya pejabat di daerah Sumatera utara. Bagaimana tidak, dalam 10 tahun terakhir, banyak pejabat kepala daerah di Kota Medan tidak mampu menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun karena tertangkap dan terbukti melakukan tindakan korupsi. Lihat Tabel 1.2. Dari fenomena tersebut,

masyarakat Sumatera Utara secara umum dan Kota Medan secara khusus tentu mendapat dampak langsung yang negatif sehingga berujung pada lambatnya kinerja Pemerintah Daerah karena tokoh Kepala Daerah yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk mengurus rakyat, harus sibuk sendiri dan mengalihkan perhatiannya untuk mengurus kasus hukum pribadinya sendiri.

Tabel 1.2 Daftar Pejabat Kota Medan yang tersangkut Kasus Korupsi Periode 2005-2015.

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Periode Jabatan	Diberhentikan	Lama Hukuman
1.	Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA	Walikota Medan	2000-2005 2005-2010	2008	5 tahun Penjara
2.	H. Syamsul Arifin, SE	Gubernur Sumatera Utara	2008-2013	2011	6 Tahun Penjara
3.	Rahudman Harahap	Walikota Medan	2010-2015	2014	5 Tahun Penjara

Dari Tabel 1.2, dapat terlihat bahwa pola hubungan kepala daerah dengan masyarakat tentu berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan dari masyarakat yang telah memberi legitimasi bagi kepala daerah tersebut. Masyarakat tentunya banyak yang golput, karena manfaat yang diperoleh masih abstrak dan tidak jelas. Di sisi yang lain yang dijadikan pilihan untuk ditawarkan kepada masyarakat adalah orang-orang yang dianggap belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Masyarakat dihimbau untuk ikut memilih calon-calon kandidat yang memiliki nilai jelek. Seandainya saja kalauprofil dan latarbelakang para kandidat tersebut jelas di mata masyarakat dan calon kandiad yang terpilihmemang bisa membuktikan pilihan itu adalah benar, maka masyarakat akan antusias memberikan suara. Tapi selama ini yang terjadi

adalah rayuan pada saat pemilihanbahkan setelah selesai pemilihan. Fakta yang terjadi di lapangan adalah siapapun yang menjadi pemenang tidak lagi sejalan dengan janji-janjinya pada saat kampanye.

Menurut Manor dan Crook (2002), ada empat penyebab pemilihan langsung kepala daerah berhubungan erat dengan praktik pemerintahan daerah yang buruk (*bad government*), yakni sebagai berikut: Pertama, tidak berfungsinya secara efektif kontrol politik dari DPRD (*council*) terhadap Kepala Daerah. Kedua, lembaga itu sama-sama memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh masyarakat. Ketiga, kecenderungan elite politik lokal di negara berkembang yang bersifat tertutup dan selalu mengooptasi kekuasaannya. Penguasaan terhadap aset, sumber daya, dan kemakmuran hanya terbatas pada

lingkaran elite yang sangat kecil. Karena itulah calon kepala daerah petahana selalu mengkooptasi kekuasaan, termasuk birokrasi dan sumber keuangan daerah untuk memenangi pilkada. Keempat, kesadaran, pengetahuan, dan jaringan masyarakat dalam mengontrol pemerintahan daerah sangat minim dan terbatas. Di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, masyarakat cenderung tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol kebijakan Kepala daerah dan implementasinya.

Persoalan Krisis Listrik di Kota Medan dan Sekitarnya.

Realitas yang dibangun pada saat kampanye terdahulu dan setelah kampanye nampaknya dalam banyak hal menjadi janji kosong belaka sebab banyak yang tidak berbanding lurus. Salah satu hal yang paling konkrit adalah krisis listrik yang terjadi di Kota Medan pada tahun 2013-2014. Dalam momen ini jugalah Pilkada Sumatera Utara digelar. Krisis listrik yang terjadi ini memang merupakan tanggung jawab PLN (Perusahaan Listrik Negara), akan tetapi dibiarkan Pemprov dan DPRD Sumut yang memiliki mandat dan kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah itu. (www.merdeka.com). Pemadaman listrik yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Sumatera Utara dinilai seperti sinetron yang tidak diketahui masa berakhirnya. Masalah krisis listrik yang terjadi di Kota Medan dan Sumatera Utara selama hampir dua tahun pada 2013-2014, ternyata membuat banyak masyarakat yang habis kesabaran. Janji-janji yang terlanjur dilontarkan selayaknya angin surga dari para kandidat yang terpilih sebelum Pilkada 2013 tersebut kehadiran dan perhatiannya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Pilkada langsung tentunya telah memberi dan membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Akan tetapi tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikendaki. Harapan terbesar tentunya para pemimpin yang terpilih melalui pilkada mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pilkada di tiap-tiap daerah. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme kawal danimbang (*check and balances*). Dimensi *check and balances* meliputi hubungan kepala daerah dengan DPRD, DPRD dengan Kepala daerah, Kepala daerah dengan rakyat, DPRD dengan rakyat, serta Kepala daerah dan DPRD dengan lembaga yudikatif dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Demokrasi dalam perumusan kebijakan akan terjamin apabila (*check and balances*) di antara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik (*stakeholders*) tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. Mereka juga wajib bertanggungjawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, maka Kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD sehingga

mekanisme *check and balances* niscaya akan bekerja. Sebagai kepala daerah yang merupakan pilihan langsung dari rakyat, sudah seharusnya kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat. Dengan melihat realitas yang terjadi di Kecamatan Medan Baru dalam konteks Pilkada langsung Sumatera Utara 2013 yang lalu, ketidakpercayaan publik itu terbukti dengan tingginya angka golput yang terjadi. Kekecewaan terhadap partai-partai politik dan para aktor politik dianggap tidak mampu membawa perubahan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, partai-partai politik masih asyik dengan kepentingannya sendiri. Harapan dan aspirasi masyarakat dibiarkan begitu saja. Fungsi partai politik yang diharapkan menjadi wadah aspirasi rakyat, sebagai pereda konflik, sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat seolah-olah tidak berfungsi. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa disalahkan karena mengambil sikap golput guna memprotes elite-elite tersebut.

Dari rumusan UU 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 3 Tahun 2007, akuntabilitas bukanlah proses yang berdiri sendiri dan bukan sekedar prosedur pelaporan dari Kepala Daerah kepada pusat, DPRD dan masyarakat. Secara horizontal akuntabilitas berkaitan dengan *check and balances* antara kepala daerah dan DPRD, agar tidak terjadi konsentrasi dominasi kekuasaan sehingga tindakan kepala daerah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan secara bersama berdasarkan kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD. DPRD tentu saja mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol

terhadap kepala daerah dan memberikan penilaian terhadap laporan kepala daerah, termasuk mengusulkan *impeachment* terhadap kepala daerah yang betul-betul melakukan *abuse of power*. Di sisi yang lain pertanggungjawaban akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Setiap elemen masyarakat mempunyai ruang dan hak untuk berpartisipasi, tanpa orang harus bertanya masyarakat atau rakyat yang mana. Ruang partisipasi inilah yang konsisten dengan pilkada secara langsung untuk mendukung akuntabilitas kepala daerah. Kepada para elit politik baik di eksekutif maupun legislatif baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, fenomena golput saat ini kiranya tidak lagi hanya dibaca sebagai ancaman terhadap legitimasi kekuasaan. Semoga dengan adanya fenomena ini, pemerintah diharapkan dapat bisa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak khususnya semua pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara dan tidak lagi hanya mementingkan kepentingan golongan.

Ada perasaan miris bagi peneliti ketika melihat sikap dan perilaku dari para elite politik di era demokrasi saat ini yang masih menggunakan tekanan-tekanan terhadap masyarakat untuk tidak bersikap dewasa dalam berpolitik. Pemahaman politik yang keliru itu sesungguhnya telah menjadi boomerang bahkan memberi pengaruh negatif yang sangat besar baik terhadap kandidat calon maupun partai-partai politik yang mengusungnya. Dengan adanya fenomena golput pada Pilkada Sumatera Utara 2013 yang lalu, pemerintah dan seluruh lembaga terkait diharapkan dapat bisa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak khususnya

semua pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara dan tidak lagi hanya mementingkan kepentingan golongan-golongan tertentu. Bagaimanapun juga, fenomena golput ini telah menjadi fenomena yang selalu hadir dalam setiap perhelatan penyelenggaraan demokrasi seperti

pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah sehingga keberadaannya harus dapat diterima oleh semua pihak terlepas dari posisi yang diambil tentang setuju atau tidak setujunya kita tentang fenomena golput tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aristoteles, 2004. *Politik (diterjemahkan dari Buku Politics, Oxford University Press)*, Yogyakarta, Bentang Budaya.
- Asfar, Muhammad. 1996. *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih, Jurnal Ilmu Politik edisi no. 16*, Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Crook C. Richard and Manor, James Manor, 2002. *Democracy and Decentralitation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javaness Voters: a Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1974. *"The Interpretation of Cultures"*. New York: Basic Book, Inc
- Hidayat, Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Marijan, Kacung. *Demokratisasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka dan Pusdeham
- Marijan Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mikkelsen, Britha, 2001: *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan (terjemahan Matheos Nalle)*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty Perihal Kebebasan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujani, Saiful dkk. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Pustaka.

- Nursal. Adman, 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Pemilu, Perilaku Pemilih, dan Kepartaian*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Jogjakarta: JIP-Fisipol-UGM.
- Prihatmoko, Joko. J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Mitra Alembana Grafika.
- Sahdan, Gregorius dan Haboddin, Mohtar. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Sanit, Arbi. 1992. *Golput Aneka Pandangan Fenomena Politik*, Yogyakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sirait, Budi, 2015. *Golput: Perilaku Pemilih Rasional; Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2013 di Kecamatan Medan Baru*. (Tesis) Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Suroto, 2003. *Partai-partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama
- Suryadinata, Leo. 2003, *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*, Jakarta; LP3S.
- Ted Robert Gurr dan Barbara Harf, 1994. *“Ethnic Conflict in World Politics”*. Boulder: Westview Press.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *“Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto”*. Jakarta: LIPI Press.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon.
- White, John Kenneth. *What is Political Party?* 2006. Dalam Hand book of Party Politics, Richard S. Kartz (ED, dkk), Sage Publication, London.

Sumber Lain:

Data KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Medan

BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Medan

BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara

Website:

<http://www.change.org/id/petisi/pemuda-indonesia-gerakan-anti-golput-di-pemilu-2014>.

<http://www.centroone.com/news/2013/11/2r/golput-akan-dihukum-ini-kata-politisi-nasdem/>

<http://ramadhansyariah.wordpress.com/pemikiran/pandangan-dan-perilaku-politik-masyarakat-muslim-pinggiran-kota-medan-pada-pemilu-2009/>

<http://www.beritasatu.com/nasional/173329-pemadaman-listrik-di-medan-makin-menjadi.html>

<http://www.merdeka.com/uang/penjelasan-dahlan-soal-krisis-listrik-di-medan-dan-sumut.html>

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/12/sumatera-utara>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/31/03124376/Menengok.Wajah.Politik.Multi.kultur>